



LAPORAN KINERJA INSTASI PEMERINTAH (LKjIP) 2019 & SISTEM AKUTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2020



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau tahun 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Semoga Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2019 yang telah tersusun ini sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kabupaten Malinau dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam capaian kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.



Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

H. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021 yang ditunjukkan dengan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Rumusan sasaran, program dan kegiatan Tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen Renstra, IKU, Renja, RKT, PK dan DPA, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara adalah berikut :





Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah: **Meningkatnya pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman serta memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan daerah dengan indikator sasaran , Jumlah Nilai Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.**

A. Sasaran Pertama adalah **Meningkatkan pendektesian dini kerawanan pangan melalui penyusunan analisis penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan indikator kinerja, Pengembangan pembuatan PSVA (peta wilayah rawan pangan) dan meningkatkan pelatihan keterampilan penanganan pasca panen olahan hasil pertanian, maka dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut :**

- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)**
 - a. Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
 - b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)

B. Sasaran Kedua adalah: **Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan indikator kinerja, Penyusunan dan Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi serta Pengembangan penganeakaraman kosumsi pangan yang sehat dan aman maka dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :**

- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)**
 - a. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - b. Pemanfaatan Pekarangan
 - c. Penyusunan Pola Pangan Harapan Konsumsi

C. Sasaran ketiga adalah: **Menjaga stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen dengan indikator kinerja, Pengembangan Cadangan Pangan dan Sistem Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan, maka dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :**





➤ **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)**

- a. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
- b. Pemantauan Cadangan Pangan
- c. Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai target kinerja yang diperjanjikan tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau memperoleh input sebagai berikut :

1. Anggaran sebesar Rp. **5.018.776.449,80**
2. Sumber daya aparatur sejumlah 33 orang PNS. Dari jumlah tersebut terdiri dari pejabat struktural. Dilihat dari jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan S2 7 (tujuh) orang, S1 12 (dua belas) orang, D3 5 (lima) orang, SLTA 8 (delapan) orang da SD 1 (satu) orang.

Dengan keterbatasan Sumber daya yang ada, prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap dikedepankan, dari analisis laporan keuangan dan kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada tahun 2019 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya kurang maksimal.

Dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim, permasalahan-permasalahan tersebut tetap dapat diatasi meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tentunya sangat membutuhkan penyempurnaan sebagai langkah perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedepan, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasana pendukung serta peningkatan jumlah personil baik terkait kualitas maupun kuantitas.

Tantangan keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM pelaksana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kualitas maupun kuantitas.





Tantangan lainnya dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembanguna pertanian dan kesadaran bertani di Kabupaten Malinau, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Malinau.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.





DAFTAR ISI		Halaman
KATA PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Pembentukan Organisasi	2
	B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Aspek Strategis Organisasi	2
	D. Struktur Organisasi	3
	E. Sumber Daya Manusia	4
	F. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	6
	G. Sistematika Penyajian	10
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	11
	A. Rencana Strategis	11
	1. Tujuan dan Sasaran	12
	2. Indikator Kinerja	14
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	15
	4. Program	17
	B. Rencana Kinerja Tahunan	25
	C. Perjanjian Kinerja	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	28
	A. Capaian Kinerja Organisasi	28
	B. Analisis Capaian Kinerja	29
	C. Pengukuran Kinerja Organisasi	36
	D. Realisasi Anggaran	40
BAB IV	PENUTUP	43



BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.





A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malinau di Bidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau diwujudkan dalam kebijakan pembangunan perkebunan 6 (enam) tahun kedepan (2016 - 2021) yang diarahkan kepada upaya-upaya sebagai berikut :





- Peningkatan produksi dan produktivitas melalui pengembangan tanaman, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dengan memperhatikan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi.
- Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain SDM aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan, SDM petani dan tenaga kerja perkebunan dalam rangka penerapan teknologi, menumbuhkan kembangkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan perkebunan dengan memperhatikan aspek kelembagaan untuk mendorong kemandirian usaha petani.

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan didalam penyelenggaraan tugas pembangunan adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;
- Kondisi iklim, jenis tanah serta tersedianya potensi sumberdaya lahan yang relatif cukup luas;
- Kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Malinau diprioritaskan melalui Gerakan Desa Membangun
- Faktor keamanan dan politis yang semakin kondusif.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas





Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum

Unsur Pelaksana adalah bidang terdiri dari :

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan
2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi Pangan
 - b. Seksi Harga Pangan
 - c. Seksi Cadangan Pangan
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Terdiri dari :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Terdiri dari :
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. Jabatan fungsional lainnya.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau per Januari 2019 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 33 orang yang terdiri dari 16 orang pejabat struktural dan 17 pegawai non struktural.





SDM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau
menurut tingkat Eselonering

No	Eselonering	Jumlah		Total
		Laki	Perempuan	
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II b	1	0	1
3	Eselon III a	1	0	1
4	Eselon III b	1	2	3
5	Eselon IV a	6	5	11
6	Non Eselon / Staf	11	7	18
Jumlah		20	14	34

Secara rinci komposisi SDM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menurut tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau										
SDM Menurut Tingkat Pendidikan										
No.	Uraian	Per 31 Desember 2019								
		Pendidikan								
		S3	S2	S1/ DIV	D III	D I	SLTA	SLTP	SD	JML
1	Struktural									
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kepala Bidang	-	2	1	-	-	-	-	-	3
	Kepala Seksi	-	3	6	-	-	-	-	-	9
	Kepala Sub Bagian	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Sub Jumlah	-	7	9	-	-	-	-	-	16
2	Pegawai Non Struktural/Staf	-	-	3	5	-	8	-	1	17
	Sub Jumlah	-	-	3	5	-	8	-	1	17
3	Honorer PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Honorer Proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	7	12	5	-	8	-	1	33

Tabel Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Per 31 Desember 2019





F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau diBidang Ketahanan Pangan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 5 yaitu:

Meningkatkan peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa, dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui pembangunan Desa Mandiri pangan dan Pembangunan lumbung Desa, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi V: Meningkatkan peran serta Pertanian (Tanaman Pangan,Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi Ke V “Meningkatkan peran serta Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
	Program Peningkatan kesejahteraan Petani	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal





Untuk permasalahan peningkatan hasil produksi pertanian belum maksimal, faktor penghambatnya adalah masih rendahnya kemampuan/keterampilan petani dalam menggunakan teknologi budidaya tanaman pangan. Agar hasil produksi pertanian tanaman pangan meningkat diperlukan penggunaan teknologi pertanian tepat guna sesuai dengan anjuran dengan memberikan pelatihan kepada petani.

Untuk permasalahan masih rendahnya pendapatan petani hal ini disebabkan karena disebabkan karena produksi pertanian yang dihasilkan masih rendah. Masih rendahnya produksi hasil pertanian tanaman pangan disebabkan oleh sarana dan prasarana produksi pertanian masih terbatas. Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian diperlukan sarana dan prasarana produksi pertanian.

Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian hal ini disebabkan karena pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Malinau belum beragam, artinya konsumsi utama makanan pokok masih berupa nasi belum ke produk pertanian lain. Sedangkan peluang produk pertanian di Kabupaten Malinau beraneka ragam.

Belum optimalnya pelayanan Dinas Ketahanan Pangan kepada Masyarakat disebabkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan baru dikukuhkan pada tanggal 12 Januari 2017, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati posisi pada masing-masing bidang tugas masih terbatas dan sarana prasarana operasional yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan juga masih terbatas. Agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilayani dengan semaksimal mungkin, aparaturnya Dinas Ketahanan pangan menggunakan sarana dan prasarana yang ada.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut. :





No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
2	Keterbatasan Infrastruktur Pertanian	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
3	Belum Optimalnya kawasan strategis Propinsi	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
4	Tofografi kawasan pertanian perbukitan dan bergunung - gunung serta kawasan pedalaman dan pedesaan/	Belum optimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masih terbatasnya sarana dan prasarana apartur	Pemanfaatan sarana dan prasarana seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari :

1. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah
2. Keterbatasan Infrastruktur Pertanian
3. Belum Optimalnya kawasan strategis Propinsi
- 4.Tofografi kawasan pertanian perbukitan dan bergunung – gunung serta kawasan pedalaman dan pedesaan

Implikasi RTRW tentang kawasan pertanian hampir keseluruhan wilayah Kabupaten malinau memiliki topografi berbukit , bergunung – gunung, kawasan pedalaman dan pedesaan sehingga secara tidak langsung menyulitkan pelayanan Dinas kabupaten Malinau jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana operasional.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :





No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
2	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Prtanian	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
3	Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
4	Peningkatan Saranan dan Prasaranan operasional pendukung pelayanan kepada masyarakat	Belum optimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masih terbatasnya sarana dan prasarana apartur	Pemanfaatan sarana dan prasarana seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

- 1. Gambaran pelayanan SKPD;
- 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/ kota;
- 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
- 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Dengan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu :

- Peningkatan Sumberdaya Apartur Dinas Ketahanan Pangan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan .
- Masih terbatasnya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.





G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan cara pencapaian melalui perencanaan taktik dan teknik agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran hingga pendanaan indikatif dengan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam satu tahun melalui Perjanjian Kinerja sesuai RKT 2019 yang tertuang dalam RENSTRA Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja organisasi dan jumlah anggaran serta realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Kinerja OPD dan capainnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

Mengungkapkan uraian singkat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau dalam rangka pencapaian visi dan misi.



1. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing - masing sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah bidang ketahanan pangan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan target pada periode yang bersangkutan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor pertanian dalam arti luas perlu dirumuskan visi dan misi sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi kelembagaan akan menjelelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah system birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian bidang ketahanan pangan di Kabupaten Malinau maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut tertuang didalam tabel berikut:

b.





Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Prosentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan :	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun
				1. Padi-padian	20,50	20.91	21.33	21.75	22.19	22.63
				2. Umbi-umbian	2,20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				3. Pangan Hewani	13,30	13.57	13.84	14.11	14.40	14.68
				4. Minyak dan Lemak	3,00	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31
				5. Buah / Biji Berminyak	0,60	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66
				6. Kacang-kacangan	9,70	9.89	10.09	10.29	10.50	10.71
				7. Gula	2,20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				8. Sayuran dan Buah	19,00	19.38	19.77	20.16	20.57	20.98
				JUMLAH	70,50	71,91	73,35	74,82	76,31	77,84

Sumber : Target IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

H. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003



2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada halaman ini dikemukakan Indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 - 2021 merupakan serangkaian rencana program yang strategik untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menetapkan visi dan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi kebijakan, dan program. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini akan terus disempurnakan dalam upaya terus meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.





TABEL 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengaju Tujuan dan Sasaran RPJMD
3.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Skor Nasional
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
((1))	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	
	1 Padi-padian	20.50	20.91	21.33	21.75	22.19	22.63	25.00	
	2 Umbi-umbian	2.20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2.50	
	3 Pangan Hewani	13.30	13.57	13.84	14.11	14.40	14.68	24.00	
	4 Minyak dan Lemak	3.00	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31	5.00	
	5 Buah / Biji Berminyak	0.60	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66	1.00	
	6 Kacang-kacangan	9.70	9.89	10.09	10.29	10.50	10.71	10.00	
	7 Gula	2.20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2.50	
	8 Sayuran dan Buah	19.00	19.38	19.77	20.16	20.57	20.98	30.00	
	9 Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	70.50	71.91	73.35	74.82	76.31	77.84	100.00	

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada urusan pertanian dan pangan maka Dinas Ketahanan Pangan menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan Kabupaten Malinau namun tetap mengerucut pada pola bidang pangan. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam arti luas.





Strategi yang akan dikembangkan melalui optimalisasi dan pengembangan lahan, peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan produk berdaya saing, mengembangkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala, peningkatan ketersediaan dan pemantauan cadangan pangan masyarakat serta penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meningkatnya pengelolaan sumber daya pertanian, peningkatan system tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan kualitas petani dan pelaku usaha.

Sedangkan kebijakan Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama, Menurunkan Jumlah Penduduk Rawan Pangan, Meningkatkan Diversifikasi pangan dan Gizi, Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok, Peningkatan kinerja instansi pemerintah, Peningkatan pembinaan dan pelatihan petani dan pelaku usaha.





Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

VISI			
“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun ”			
MISI ke V			
Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan pendektesian dini kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pembuatan PSVA (peta wilayah rawan pangan)• Meningkatkan pelatihan keterampilan penanganan pasca panen olahan hasil pertanian• Penyusunan analisis penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)• Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
		Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	Penyusunan dan Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi serta Pengembangan pengankaraman kosumsi pangan yang sehat dan aman
		Menjaga stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	Pengembangan Cadangan Pangan dan Sistem Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan

Sumber : RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

4. Program

Secara garis besar program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah 4 program dan 24 kegiatan, sebagaimana tersebut dibawah ini:





**Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 1. Penyediaan jasa peralatan kantor
 2. Penyediaan alat tulis kantor (ATK)
 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Dalam dan Luar Daerah)
- II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
 5. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
- III. Program Peningkatan disiplin aparatur**
 6. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- IV. Program Peningkatan Ketahanan Pertranian/Perkebunan**
 7. Penanganan daerah rawan pangan
 8. Penyusunan data base potensi produk pangan
 9. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
 10. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
 11. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
 12. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
 13. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 14. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
 15. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
 16. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 17. Pengembangan cadangan pangan daerah
 18. Pengembangan desa mandiri pangan
 19. Pengembangan diversifikasi pangan
 20. Pengembangan lumbung pangan desa
 21. Pengembangan model distribusi pangan efisien
 22. Pengembangan sistem informasi pasar
 23. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 24. Penyuluhan sumber pangan alternative



Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 Terlampir adalah sebagai berikut :





TABEL 6.1

Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan

juan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada				
									2017		2018		2019		2020		2021		Akhir Priode RPJMD				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4			5	6	7		8		9		10		11		12		13	14	15	
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya aparatur dan memperkuat kelembagaan petani secara optimal dan berkesinam bungan	Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kelembagaan petani secara optimal dan berkesinam bungan	Membuat program dan melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan dengan pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan secara optimal dan berkesinam bungan	1	1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan adminitrasi perkantoran																
			1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah prosentase penggunaan alat tulis kantor dalam satu tahun	-	90%	52.00	90%	50.50	90%	51.27	90%	53.17	90%	53.77	100%	260.71	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Malinau	
			1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah prosentase penggunaan barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun	-	-	90%	14.00	90%	14.00	90%	14.52	90%	11.35	100%	14.00	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Malinau		
			1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah prosentase penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun	-	90%	133.55	-	-	-	-	-	-	-	100 5	133.55	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Malinau		



			1	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Prosentase Pelaksanaan Konsultasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan	-	90%	174.14	90%	180.00	90%	174.00	90%	180.44	90%	150.55	100 5	859.13	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Malinau	
			1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur																
			1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas /Operasional yang terpelihara	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	25.93	1 Unit	26.89	1 Unit	52.82	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Malinau			
			1	3		Program peningkatan displin aparatur	Presentase kapasitas aparat yang melaksanakan disiplin aparatur																
			1	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian daerah/olahraga aparatur	-	-	-	30 Org	-	34 Org	29.04	34 Org	30.11	34 Org	59.15	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Malinau			

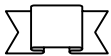


Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatny a Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan pendektesian dini kerawanan pangan.	1	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/	Ketersediaan Pangan Utama															
			1	16	1	Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);			209.90		-		40.00	2 Ds	40.00	2 Ds	53.77	10 Ds	343.67	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	16	4	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah Dokumen Pembuatan Analisis Neraca Bahan Makanan	-		-	1 Dok	50.00	1 Dok	40.00	1 Dok	50.00	1 Dok	53.77	5 Dok	55.76	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Orang / Kelompok Masyarakat Produktif yang terlatih dalam Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	-	50 Org	128.52	100 Org	100.00	100 Org	-	100 Org	100.00	100 Org	107.54	500 Org	436.06	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau
		Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	1	16	2	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah Skor Persentase Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	-	80%	94.69	80%	50.00	%	-	%	-	%	-	100%	144.69	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabu paten Malinau
			1	16	3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Skor PPH Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	-		-		-	1 Dok	70.00	1 Dok	60.00	1 Dok	107.54	1 Dok	237.54	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabu paten Malinau





1	2	3	4			5	6	7		8		9		10		11		12		13	14	15
			1	16	9	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Jumlah Desa /KWT Optimalisasi dan Pemberdayaan Pemanfaatan Perkarangan Rumah	-		-	2 KWT	150.00	2 KWT	50.00	1 Pkt	100.00	1 Pkt	182.81	5 thn	482.81	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabu paten Malinau
			1	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Petugas Penanganan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	-	50 Org	143.60	8 Org	140.00	Dok	40.00	Dok	40.00	Dok	64.52	Dok	428.12	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabu paten Malinau
			1	16	30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah Persentase Pembinaan/ Sosialisasi tentang kosumsi panganan yang sehat beragam, bergizi dan seimbang	-		-		-	20.00		20.00		-	5 Thn	40.00	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabu paten Malinau	
		Menjaga stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	1	16	6	Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan	Jumlah Persentase Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	-		-		-	80%	25.00	85%	25.99	1 Dok	53.77	90%	104.76	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabu paten Malinau
			1	16	11	Pemantauan harga pangan pokok	Jumlah Persentase Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	-	80%	63.48		-	85%	30.00	90%	30.00	95%	53.77	100%	177.25	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabu paten Malinau





1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			1	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Persentase Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	85%	26.00	90%	25.00	95%	75.28	100%	126.28	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabupaten Malinau
									999.88	734.50	580.27	794.08	1,025.44	4,134.18						

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



H. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau selama tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus di dapat selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam rencana kinerja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan evektifitas kegiatan.

Ikhtisar target kinerja 2019 untuk masing-masing sasaran strategik yang hendak di capai dengan pelaksanaan 2 Program yang dijabarkan ke dalam 12 kegiatan strategis pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	1 2 Bulan
2	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyadiaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
3	Melaksanakan Konsultasi,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Peningkatan Implementasi Program Bidang Ketahanan Pangan	12 Bulan
4	Melaksanakan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah Dokumen Data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dokumen
5	Melaksanakan Penyusunan Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Dokumen
6	Melaksanakan Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	1 Dokumen
7	Melaksanakan Pemantauan Cadangan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1 Dokumen
8	Melaksanakan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah Dokuman Data dan Informasi Harga pangan Pokok	1 Dokumen



No	Sasaran	Indikator	Target
9	Melaksanakan Penyusunan Pola Pangan Harapan Konsumsi	Jumlah Skor PPH Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	1 Dokuman
10	Melaksanakan Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA	Jumlah Persentase Pembinaan/Sosialisasi tentang kosumsi panganan yang sehat beragam, bergizi dan seimbang	1 Dokuman
11	Melaksanakan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa melaksanakan Pemanfaatan Pekarangan	1 KWT
12	Melaksanakan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Dokumen Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1 Dokuman

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau berdasarkan APBD tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat ketersediaan	78,62 %

Pada penetapan Kinerja tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 1 (satu) indikator, dimanana indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, 1 Indikator merupakan IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RENSTRA dan RPJMD. Untuk melaksanaakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut :



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RP. 239.272.687,00	APBD
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 341.000.000,00	APBD
	TOTAL	Rp. 580.272.687,00	

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2019 pada Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 2 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 580.272.687,00 secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :</u> 1) Penyediaan Alat Tulis Kantor 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 51.272.687,- Rp. 14.000.000,- Rp. 174.000.000,-	APBD APBD APBD
2	<u>Program Peningkatan Ketahanan Pangan :</u> 1) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) 2) Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 3) Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan 4) Pemantauan Cadangan Pangan 5) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 6) Penyusunan Pola Pangan Harapan Konsumsi 7) Lomba Cipta Menu B2SA 8) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 9) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Rp. 40.000.000,- Rp. 40.000.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 26.000.000,- Rp. 30.000.000,- Rp. 70.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 40.000.000,-	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
	Jumlah	Rp. 580.272.687,-	



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada tahun 2019 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari sasaran yang ditetapkan secara umum semuanya telah dapat di capai dengan baik.

Pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	Bulan	12	12	100
2	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	6	6	100
3	Melaksanakan Konsultasi,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Peningkatan Implementasi Program Bidang Ketahanan Pangan	Bulan	12	12	100
4	Melaksanakan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah Dokumen Data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen	1	1	100
5	Melaksanakan Penyusunan Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen	1	1	100
6	Melaksanakan Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Dokumen	1	1	100
7	Melaksanakan Pemantauan Cadangan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dokumen	1	1	100
8	Melaksanakan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah Dokuman Data dan Informasi Harga pangan Pokok	Dokumen	1	1	100



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
9	Melaksanakan Penyusunan Pola Pangan Harapan Konsumsi	Jumlah Skor PPH Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Dokumen	1	1	100
10	Melaksanakan Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA	Jumlah Persentase Pembinaan/Sosialisasi tentang kosumsi panganan yang sehat beragam, bergizi dan seimbang	Dokumen	1	1	100
11	Melaksanakan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa melaksanakan Pemanfaatan Pekarangan	Dokumen	1	1	100
12	Melaksanakan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Dokumen Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Dokumen	1	1	100

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah berhasil merealisasikan sebagian besar sasaran di tahun 2019 bahkan banyak indikator kinerja melampaui target. Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum sesuai target yang diharapkan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerj Tahun 2019 dengan Tahun lalu dan Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun lalu				Presentasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2019 vs Tahun			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan dan perikanan	Pelayanan Administrasi Perkantoran										
		Jml Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %
		Jml Penyediaan ATK	Bulan	12	0	12	12	12	0 %	100 %	100 %	100 %



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun lalu				Presentasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2019 vs Tahun			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jml Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	0	0	12	12	0 %	0 %	100 %	100 %
		Jml Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	6	0	6	0	0	0 %	100 %	0 %	0 %
		Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Bulan	12	0	12	12	12	0 %	100 %	100 %	100 %
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Unit	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Tahun	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %
		Peningkatan Disiplin Aparatur										
		Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Orang	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun lalu				Presentasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2019 vs Tahun			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Peningkatan Ketahanan Pangan										
		Jumlah Penanganan daerah rawan pangan	Kecamatan	0	0	2	0	1	0 %	100 %	0 %	100 %
		Jumlah Penyusunan data base potensi produk pangan	Dok	1	0	1	1	0	0 %	100 %	100 %	0 %
		Jumlah Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Dok	0	0	0	0	1	0 %	0 %	0 %	100 %
		Jumlah Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Dok	1	0	0	1	1	0 %	0 %	100 %	100 %
		Jumlah Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Dok	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun lalu				Presentasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2019 vs Tahun			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Dok	0	0	0	0	1	0 %	0 %	0 %	100 %
		Jumlah Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	KWT	2	0	0	2	1	0 %	0 %	100 %	100 %
		Jumlah Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Paket	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %
		Jumlah Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Dok	0	0	1	0	1	0%	100%	0%	100%
		Jumlah Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Orang	100	0	50	100	0	0%	50%	100%	0%
		Jumlah Pengembangan cadangan pangan daerah	Paket	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	100%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun lalu				Presentasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2019 vs Tahun			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Pengembangan desa mandiri pangan	Desa	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Pengembangan an diversifikasi tanaman	Paket	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Pengembangan lumbung pangan desa	Paket	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Paket	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Pengembangan sistem informasi pasar	Paket	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Orang	0	0	50	0	1	0%	0%	34%	100%
		Penyuluhan sumber pangan alternatif	Tahun	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 degan target
Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Renstra Tahun						Presentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatkan Produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan dan perikanan	Pelayanan Admnistrasi Perkantoran														
		Jml Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0
		Jml Penyedian ATK	Bulan	12	0	12	12	12	12	12	0	100	100	100	100	100
		Jml Penyedian barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	0	12	12	12	12	12	0	100	100	100	100	100
		Jml Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0	0	6	12	12	12	12	0	50	50	50	50	50
		Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Bulan	12	0	12	12	12	12	12	0	100	100	100	100	100
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
		Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0
		Peningkatan Disiplin Aparatur														
		Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Orang	0	0	0	35	40	40	40	0	0	0	0	0	0



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Renstra Tahun						Presentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan														
		Jumlah Penanganan daerah rawan pangan	dok	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0
		Jumlah Penyusunan data base potensi produk pangan	Dok	=	0	1	1	1	1	1	0	100	100	0	0	0
		Jumlah Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Dok	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	100	0	0
		Jumlah Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Dok	1	0	1	1	1	1	1	0	100	100	100	0	0
		Jumlah Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Dok	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Dok	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	KWT	1	0	1	1	1	1	1	0	100	100	100	0	0
		Jumlah Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Dok	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Renstra Tahun						Presentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Dok	1	0	1	0	1	1	1	0	100	0	100	0	0
		Jumlah Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Orang	0	0	50	100	100	100	100	0	200	100	0	0	0
		Jumlah Pengembangan cadangan pangan daerah	Dok	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	100	0	0
		Jumlah Pengembangan desa mandiri pangan	Desa	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pengembangan diversifikasi tanaman	Desa	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pengembangan lumbung pangan desa	Desa	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Paket	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pengembangan sistem informasi pasar	Paket	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Orang/Dok	1	0	50	50	1	1	1	0	100	30	100	0	0
		Penyuluhan sumber pangan alternatif	Desa	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	100	0	0

C. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yaitu Ketersediaan Pangan Daerah adalah Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :



Pangan Utama (Ton)

Ketersediaan Pangan Utama = X 1000 = Kg/Orang

Jumlah Penduduk (Orang)

Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Malinau Tahun 2019
(Angka Tetap 2018)

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Impor (Ton)	Total (Ton)
1	Beras	10.002	1.628	11.630
2	Jagung Kering	1.281	25	1.306
3	Kedelai	2	600	602
4	Kacang Tanah	3	32	35
5	Ubi Kayu	1.148	45	1.193
6	Ubi Jalar	8	28	36
7	Sayur	1.011	2.007	3.018
8	Buah-buahan	12.474	1.671	14.145
9	Minyak Goreng	-	823	823
10	Gula	-	1.016	1.016
11	Daging Sapi	16	2	18
12	Daging Ayam	497	209	706
13	Telur	20	1.370	1.390
14	Susu	-	859	859
15	Ikan	250	929	1.179
Jumlah		26.712	11.244	37.956

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2018

No	Konsumsi	Kal/Kap/Hari	Gram/Kap/Hari
1	Kalori/Energi	2.415	-
2	Protein	-	61,85

Capaian IKK Dinas Ketahanan PanganTahun 2019 (Angka Tetap 2018)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
13	Ketahanan Pangan	50	Ketersediaan Pangan Utama	<u>Rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun :</u>		
				11.630 Ton		
				79.903 Orang x 1000 (Jumlah Penduduk)	145,55 Kg/Orang	

Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Malinau Tahun 2019
(Angka Tetap 2018)

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Skor Riil terhadap Skor Maks
1	Padi-padian	1,598	72.65	0,5	36.3	25.00	25.00	+
2	Umbi-umbian	94	4.28	0,5	2.1	2.10	2.50	-
3	Pangan Hewani	140	6.35	2,0	12.7	12.70	24.00	-
4	Minyak dan Lemak	249	11.30	0,5	5.7	5.00	5.00	+
5	Buah / Biji Berminyak	22	1.01	0,5	0.5	0.50	1.00	-
6	Kacang-kacangan	83	3.75	2,0	7.5	7.50	10.00	-
7	Gula	125	5.66	0,5	2.8	2.50	2.50	+
8	Sayuran dan Buah	105	4.78	5,0	23.9	23.20	30.00	-
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,372	110		92.0	79.20	100	

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan & Gizi (WNPG) x tahun 2012

Angka Kecukupan Gizi tingkat ketersediaan

Energi : 2.400 kkal/kap/hr

Protein : 63 gr/kap/hr

KETERANGAN :

1. Ketersediaan Energi Kalori /Kalori/Tahun adalah 2.372 Kalori/Hari, artinya asupan energy yang berasal dari karbohidrat, protein dan lemak masih kurang dari standar nasional yang ditetapkan yaitu 2.400 Kalori / Hari
2. Angka Prosentase Kecukupan Ekonomi sebesar 110 %, artinya prosentase angka kecukupan energy ketersediaan diperoleh dari energy dibagi dengan standar 2.400 Kalori / Hari masih kurang.
3. Terdapat nilai + atau kelebihan energi ketersediaan pada kelompok bahan Padi-padian dari skor Maksimal 25,00 yaitu tercapai 36,3 Kalori /Hari/Tahun dikarenakan meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjualbelikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar)
4. Skor PPH Ketersediaan 79,20 adalah masih dibawah SPM Nasional yaitu 83,2
5. Capaian Evaluasi Sasaran Riil tahun 2018 sebesar 92, 00 % dari Target Capaian 100% (Skor Maksimal / Nasional)



Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau :

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2019 berdasarkan Angka Tetap Tahun 2018 sebagai berikut :

Indikator Kerja Utama	Target PPH 2018	Target PPH 2019	Realisasi PPH 2018	% Capaian 2018	PPH 2017
PPH Ketersediaan					
Padi-padian	21,33	21,76	25,00	117%	25,00
Umbi-umbian	2,29	2,34	2,10	92%	2,50
Pangan Hewani	13,84	14,12	12,70	92%	11,10
Minyak dan Lemak	3,12	3,18	5,00	160%	5,00
Buah / Biji Berminyak	0,62	0,63	0,50	81%	0,60
Kacang-kacangan	10,09	10,29	7,50	74%	8,20
Gula	2,29	2,34	2,50	109%	2,50
Sayuran dan Buah	19,77	20,17	23,90	121%	23,20
JUMLAH	73,35	74,82	79,20	-	78,10

Sumber : Renstra dan Bidang Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Skor PPH Ketersediaan Target 73,35 dengan Capaian Evaluasi sebesar 79,20 dengan kelebihan peningkatan 107,98 % dikarenakan terdapat bahan Padi-padian dari skor Maksimal 25,00 yaitu tercapai 36,3 Kalori /Hari/Tahun karena meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjualbelikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar)



D. REALISASI ANGGARAN

Target tahun 2019, pembiayaan rutin Dinas Ketahanan Pangan diperoleh dari :

- 1. Dana Pembangunan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan diperoleh dari dana rutin Pemerintah Daerah. Total dana rutin yang dianggarkan dalam DIKDA Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. **5.018.776.449,80** Rincian anggaran dana rutin dapat dilihat pada tabel :

Rincian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

Belanja Tidak Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.	4.438.503.762,80
2.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	-
Belanja Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.	56.290.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	523.982.687,00
3.	Belanja Hibah	Rp.	-
	Jumlah Anggaran Rutin	Rp	5.018.776.449,80

Sumber : DIKDA TA 2019, Dinas Ketahanan Pangan

- 3. Dana Pembangunan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sebagai berikut :



Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Pelayanan Admnistrasi Perkantoran								
		Jml Penyediaan ATK	Bulan	12	12	100 %	Penyediaan ATK	51.272.687	51.272.687	100 %
		Jml Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100 %	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000	14.000.000	1000 %
		Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Bulan	12	12	100 %	Rapat - rapat Koordinasin dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	174.000.000	174.000.000	100 %
		Peningkatan Ketahanan Pangan								
		Jumlah Dokumen Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dok	1	1	100%	Penanganan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	40.000.000	39.926.200	99,82 %
		Jumlah Dokumen Pembuatan Analisis Neraca Bahan Makanan	Dok	1	1	100%	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	40.000.000	39.650.000	99,13 %
		Jumlah Dokumen Skor PPH Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Dok	1	1	100%	Penyusunan dan Analisa Data PPH Konsumsi	70.000.000	69.769.200	99,67 %
		Jumlah Desa/KWT Optimalisasi dan Pemberdayaan Pemanfaatan Perkarangan Rumah	Dok	1	1	100%	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	50.000.000	49.964.200	99,93 %
		Jumlah Petugas/Dokumen Penanganan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Dok	1	1	100%	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	40.000.000	39.198.843	98,00 %
		Jumlah Pembinaan/Sosialisasi tentang kosumsi panganan yang sehat beragam, bergizi dan seimbang	Dok	1	1	100%	Lomba Cipta Menu B2SA	20.000.000	20.000.000	100 %



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Peningkatan Ketahanan Pangan								
		Jumlah Dokumen Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan	Dok	1	1	100%	Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan	25.000.000	25.000.000	100 %
		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Dok	1	1	100%	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	30.000.000	29.380.000	97,93 %
		Jumlah Dokumen Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dok	1	1	100%	Permantauan Cadangan Pangan	26.000.000	26.000.000	100 %

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dari sasaran yang harus di capai pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan, maka 12 kegiatan telah tercapai dengan baik yaitu realisasi keuangan **99,64 % sebesar Rp. 578.161.130,- dengan bobot fisik 12 kegiatan 100 %**. Berdasarkan SIMDA KEUANGAN Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau secara umum **Dinas Ketahanan Pangan** realisasi keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah **98,16 % sebesar Rp. 4.962.502.674,-**

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

Belanja Tidak Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.	4.438.341.544,00
2.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	-
Belanja Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.	56.290.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	521.871.130,00
3.	Belanja Hibah	Rp.	-
	Jumlah Anggaran Rutin	Rp	4.926.502.674,0

Sumber : SIMDA KEUANGAN TA 2019, Dinas Ketahanan Pangan



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran

Keberhasilan pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Malinau sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Kabupaten Malinau.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2019 telah mencapai 98,16% (Sangat Tinggi) dibandingkan dengan target tahun 2018 pada akhir periode Renstra dengan capaian 97,76% (Sangat Tinggi), maka capaian tahun 2019 tidak terlalu jauh dari capaian tahun 2018. pelaksanaan sasaran strategis Dinas Ketahanan pangan didukung 2 program dengan jumlah anggararan Rp. 580.272.687,00 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 578.161.130,00 (99,64%), prosentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori Sangat baik. Efesiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 8,30%, tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.





Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,


H. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Gadis Lantai 2 Blok C
M A L I N A U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
NOMOR :011/521/SK-TIM LKjIP/VII/2019

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, maka perlu dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi;



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGANTENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KETAHANAN PANGAN.**

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggungjawab : H. Saparudin, S.Sos.,M.Si
Ketua : Drs. Umar
Sekretaris : Hj. Endang Susanti, SP

Anggota : 1. MAGdalena, SP., M. Si
2. Yonatan, S.hut
3. Rosdiana, SP.,MM
4. Hj. Christina Debora, SP
5. Ir. Tito Syafriyanto
6. Suhartini, SP., M. Si
7. Juli Erni, SP
8. Noni Ivana, SP.,M.Si
9. Padli, S. Pt
10. Yance Nikolas, S. Hut., MM
12. Ahmad Mustawa, SP
13. Nasrullah
14. Andri, SE., M. Si

Sekretariat : 1. Irwan Djunaid, S.Sos
2. Rodi
3. Arbenah, A.Md
4. Yosie Rijani, SE
5. Salmiah

- KEDUA** : Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKjIP;
 - b. melakukan pengolahan data penyusunan Laporan pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKjIP;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama terkait hal-hal yang berkaitan dengan data LKjIP;
 - d. melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKjIP;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 08 Juli 2019**

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN,**



H. SAPARUDIN, S.Sos., M.Si
NIP. 19640125 198601 1 003



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

**JL. Pusat Pemerintahan Gedung C Lantai II Gabungan Dinas
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara 77554**

©Copyright_SungramKETAPANG